

RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	5
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	5
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	9
BAB IV : PENUTUP.....	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat diantaranya ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2024 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

Kami menyadari seepenuhnya bahwa dalam penyusunan renja perubahan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan Renja di tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Ini.

Bolaang, 5 Juli 2024
Mengetahui,
Inspektur Daerah

Sulha Makedompis, S.Pd., MM
NIP. 19680403 199103 2 018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri tiga tahapan utama yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen renja OPD yang definitif.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dalam periode satu tahun yang memuat program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Dalam penyusunan renja perangkat daerah dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa factor diantaranya hasil evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra OPD, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun Renja Perubahan.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penyusunan perubahan renja Inspektorat Daerah didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024. Selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKAP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai pedoman penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penetapan kinerja setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Inspektorat Daerah agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Perencanaan dan penganggaran.
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur.
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Inspektorat Daerah.
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Inspektorat Daerah.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Rencana Kerja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja

- 2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024) yang diukur dari target capaian program Tahun 2024 bahwa capaian yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan. Gambaran tentang kondisi target menurut capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran renja perubahan ini. Dimana pada Inspektorat Daerah terdapat 3 (Tiga) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan

- 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 4) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 14) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 15) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Sub Kegiatan

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu Laporan Kinerja;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Pengawasan Desa;
- 6) Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 7) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- 8) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pendampingan dan Asistensi;

Sub Kegiatan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- 4) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Secara keseluruhan Program Kegiatan dan sub Kegiatan tersebut di atas masih belum memenuhi target yang telah direncanakan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 pada lampiran renja perubahan ini, Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan sampai dengan triwulan II namun belum terlaksana seperti Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Hal ini belum dilaksanakan karena rencananya untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III serta melihat ketersediaan anggaran.
2. Selain itu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan juga masih memiliki realisasi 0% karena kami menunggu rapat yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi dalam membahas Program Kerja Pengawasan

Tahunan yang biasanya dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

3. Selanjutnya untuk Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II ini realisasinya masih 0%, karena kegiatannya rencananya akan dilaksanakan pada trwiulan IV.
4. Secara keseluruhan program dan kegiatan di Inspektorat sampai dengan triwulan II ini telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi kinerja sudah pada angka 73,97%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 terdapat 3 Program 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun rumusan Program dan Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 pada lampiran renja perubahan ini.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2024, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2024 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Inspektorat Daerah dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Boroko, 5 Juli 2024
Mengesetahu,
Inspektur Daerah

Sulha Makodonggis, S.Pd., MM
NIP. 19680405 199103 2 018

Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	3	4	5
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	59,54 Persen	62,67 Persen
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	6,00 Dokumen	85,71 Persen
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2,00 Laporan	50,00 Persen
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Laporan	4,00 Laporan	133,33 Persen
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	41,00 Orang	100,00 Persen
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	63,76 Persen	63,76 Persen
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4,00 Dokumen	100,00 Persen
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	4,00 orang	40,00 Persen
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	39 orang	20,00 orang	51,28 Persen
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	36,66 Persen	36,66 Persen
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	2,00 Paket	50,00 Persen
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	0,00 Paket	0,00 Persen
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1,00 Laporan	20,00 Persen
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44,44 Persen	44,44 Persen
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 Laporan	1,00 Laporan	33,33 Persen
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	12 Laporan	6,00 Laporan	50,00 Persen
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang diadakan	12 Laporan	6,00 Laporan	50,00 Persen
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	26,66 Persen	26,66 Persen
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	7,00 unit	46,67 Persen

6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	1,00 unit	33,33 Persen
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0,00 unit	0,00 Persen
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyenggaraan pengawasan	93 Persen	48,49 Persen	52,14 Persen
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	93 Persen	59,95 Persen	64,46 Persen
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	0,00 Laporan	0,00 Persen
6.01.02.2.01.0003	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	72 Laporan	61,00 Laporan	84,72 Persen
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	2,00 Laporan	66,67 Persen
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	15,00 Laporan	187,50 Persen
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	72 Laporan	15,00 Laporan	20,83 Persen
6.01.02.2.01.0007	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	0,00 Dokumen	0,00 Persen
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	90 Persen	37,03 Persen	41,14 Persen
6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	2,00 Laporan	16,67 Persen
6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	1,00 Laporan	25,00 Persen
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	113,89 Persen	122,46 Persen
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00 Persen
6 01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	1,00 Dokumen	100,00 Persen
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan asistensi koordinasi, monitoring dan evaluasi	93 Persen	127,77 Persen	137,39 Persen
6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 Perangkat Daerah	35,00 Perangkat Daerah	233,33 Persen
6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 Perangkat Daerah	11,00 Perangkat Daerah	100,00 Persen
6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	10,00 Persen	50,00 Persen
Rata- Rata Tingkat Pencapaian Kinerja (%)			73,97	Persen	

Borek, 5 Juli 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SULHA MOKODOMRIS, S.Pd., MM
NIP. 19680403 199104 2 018

Tabel 3.1
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95 Persen	3.819.113.041	3.987.360.401	-168.247.360	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	2.622.500	2.622.500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.121.500	1.121.500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.501.000	1.501.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.258.628.548	3.426.875.908	-168.247.360	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

Tabel 3.2
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPd TAHUN 2024 MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	95 Persen	3.819.113.041	3.987.360.401	-168.247.360	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	2.622.500	2.622.500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.121.500	1.121.500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.501.000	1.501.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.258.628.548	3.426.875.908	-168.247.360	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	41 orang	3.258.628.548	3.426.875.908	-168.247.360	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	107.023.950	107.023.950	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	1.501.000	1.501.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	5 orang	95.794.600	95.794.600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	39 orang	39 orang	9.728.350	9.728.350	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	67.858.331	67.858.331	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembang unan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	33.061.731	33.061.731	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1.796.600	1.796.600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	33.000.000	33.000.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	221.596.112	221.596.112	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3.867.500	3.867.500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	12 Laporan	12 Laporan	39.720.492	39.720.492	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang diadakan	12 Laporan	12 Laporan	178.008.120	178.008.120	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	161.383.600	161.383.600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit	15 unit	81.260.000	81.260.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	6.940.000	6.940.000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	73.183.600	73.183.600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	93 Persen	93 Persen	710.537.300	960.537.300	-250.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase hasil pengawasan	93 Persen	93 Persen	515.537.400	765.537.400	-250.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.02 2.01.0002	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	7 Laporan	36.900.150	36.900.150	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.02 2.01.0003	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	72 Laporan	72 Laporan	186.294.450	386.294.450	-200.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.02 2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	45.095.550	45.095.550	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.02 2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	8 Laporan	125.997.650	175.997.650	-50.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6.01.02 2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	72 Laporan	72 Laporan	94.650.150	94.650.150	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6.01.02 2.01.0007	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	26.599.450	26.599.450	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	90 Persen	90 Persen	194.999.900	194.999.900	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan	81.400.450	81.400.450	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	4 Laporan	113.599.450	113.599.450	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	93 Persen	93 Persen	348.778.500	473.978.500	-125.200.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.150	9.998.150	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat

6 01 03 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.150	9.998.150	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil pendampingan asistensi koordinasi, monitoring dan evaluasi	93 Persen	93 Persen	338.780.350	463.980.350	-125.200.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	61.242.100	86.442.100	-25.200.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	2.161.850	2.161.850	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	275.376.400	375.376.400	-100.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Inspektorat
JUMLAH					4.878.428.841	5.421.876.201	-543.447.360			

